

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Adami Chazawi. 2019. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian II*. Rajawali Pers, Depok.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adek Junjunan Syaid. 2025. *Pembaruan Hukum Pidana*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Amelia Zuliyani Siregar dan Nurliana Harahap. 2019. *Strategi dan Teknik Penulisan Karya Tulis Ilmiah dan Publikasi*. Deepublish, Yogyakarta.
- Andi Hamzah. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Softmedia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*. Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP dan Perkembangannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana, Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana, Jakarta.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika, Jakarta.
- Fadillah Sabri. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana Dokter*. Rajagrafindo Persada, Depok.

- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid II. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.
- Johnny Ibrahim. 2007. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. UMM Press, Malang.
- Leden Marpaung. 2017. *Tindak Pidana Korupsi: Pemberantasan dan Pencegahan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya Harahap. 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Machmud Yunus. 2025. *Bahasa dan Keadilan: Pendekatan Linguistik Forensik di Pengadilan*. CV Gita Lentera, Padang.
- Mia Amelia. 2025. *Buku Ajar Pembaharuan Hukum Pidana*. PT Green Pustaka Indonesia, Yogyakarta.
- Moch. Nazir. 2008. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2011. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Panggabean. 2020. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi: Teori-Praktik dan Yurisprudensi di Indonesia*. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2012. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. PT Bina Ilmu, Surabaya.
- Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

- Rachmadi Usman. 2019. *Hukum Pencatatan Sipil*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Ridwan HR. 2020. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Rajawali Pers, Depok.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia, Bogor.
- R. Subekti. 1991. *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Rudi Anton dan H. Siti Hannah. 2025. *Panduan Praktis Penataan dan Pengamanan Arsip Keluarga*. CV Budi Utama, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2019. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Edisi Revisi. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTM, Jakarta.
- Surnano Sastro Atmodjo. 2025. *Hukum Pidana*. Eureka Media Aksara, Jawa Tengah.
- Tomi Wicaksono Putra. 2023. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Hacking*. PT Nasya Expanding Management, Jawa Tengah.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

### **C. Jurnal dan Skripsi**

Andi Muhammad Syukri, & Siti Nurhaliza. 2024. "Transformasi tanggung jawab hukum aparat sipil negara dalam pelayanan publik pasca pengundangan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023." *Jurnal Riset Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(1).

Anis Rifai. 2022. "Rekonstruksi peraturan pertanggungjawaban pidana pihak yang menggunakan dokumen palsu." *Indonesia Journal of Criminal Law and Criminology*, 3, 35–47.

Burhan. 2023. Efektivitas penyidikan tindak pidana pemalsuan dokumen regident buku pemilik kendaraan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 4(2), 402–418.

Hartahta, M. A. B. 2023. "Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencetakan E-KTP palsu (Studi Putusan Nomor 194/Pid.B/2022/PN Tkj)," *Skripsi*, Universitas Lampung.

Henny Saida Flora. 2026. "Pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan surat dalam perspektif hukum pidana Indonesia." *Jurnal Profil Hukum*, 4(1), 1–12.

Joko Tri Setiawan, Hadi Mahmud, & Dika Yudanto. 2023. "Hukum tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan sipil (Studi kasus Putusan Nomor 1251/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr)." *Jurnal Bevinding*, 1(3), 47–50. <https://jurnal.uniba.ac.id/index.php/bevinding>

Mayang, D., Panca Wani, & Warisul Ambia. 2021. "Strategi pengawasan keimigrasian serta peran hukum keimigrasian dalam menghadapi ancaman kedaulatan negara di Indonesia." *Jurnal Sains Riset*, 11(1), 44–56.

- Mega Bintang Ninage, & Amalia Diamantina. 2022. "Pencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Semarang." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 197–212.
- R. Muhammad Mihradi, & Herry Arianto. 2020. "Implementasi kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penegakan peraturan daerah di Kabupaten Bogor." *PAJOUL (Pakuan Justice Journal of Law)*, 2(1), 16–45. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/pajoul/article/view/2508>
- Sonhaji, & Arista Candra Irawati. 2026. "Implementasi ketentuan batas usia dewasa dalam pelayanan hukum dan administrasi kependudukan pada Pemerintah Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang." *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 7(1), 243–255. <https://doi.org/10.55357/is.v7i1>